

**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MEDAN SESUAI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2008
DALAM MENGATASI BANJIR ROB DI
KECAMATAN MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

OLEH:

ADINDA RISKA SARI

198520025



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/10/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**IMPLEMENTASI PERAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA MEDAN SESUAI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2008 DALAM
MENGATASI BANJIR ROB DI KECAMATAN MEDAN
BELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Medan Area

OLEH:

ADINDA RISKA SARI

198520025

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan


Nama Mahasiswa : Adinda Riska Sari

NPM : 198520025

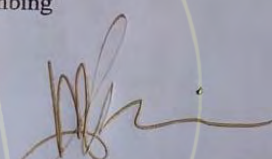
Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing


Drs. Bahrum Jamil, MAP

Pembimbing I


Marlina Deliana, SAB, MAB

Pembimbing II

Mengetahui



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Dekan



Khairunnisa Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Kaprodi

Tanggal lulus: 11 Agustus 2023

ii

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Adinda Riska Sari

NPM : 198520025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : “Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 11 Agustus 2023


Adinda Riska Sari

198520025

RIWAYAT HIDUP

PROFIL

Nama : Adinda Riska Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkatan, 5 Juni 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jala IX, Lorong Teratai, Medan Marelan
No Hp : 085361771330

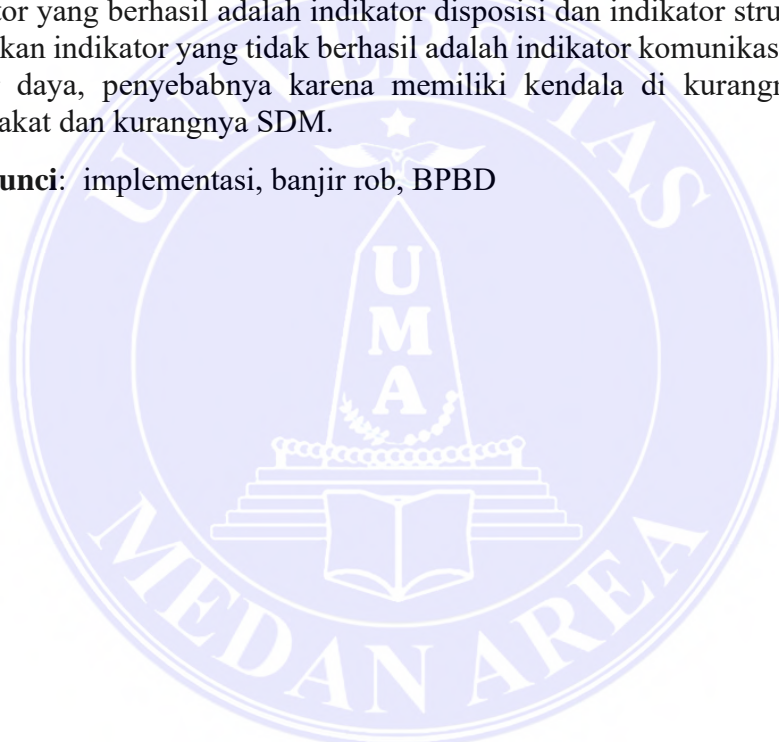
RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2007-2013 SD Negeri 010222 Sei Simujur
2. 2013-2016 SMP Negeri 2 Rantau Selatan
3. 2016-2019 SMA Negeri 1 Rantau Selatan
4. 2019-2023 Universitas Medan Area

Abstrak

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui Implementasi Peran BPBD Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan dan untuk mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam mengatasi banjir rob di Kecamatan Medan Belawan. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edwards III (2006) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa indikator yang berhasil adalah indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Sedangkan indikator yang tidak berhasil adalah indikator komunikasi dan indikator sumber daya, penyebabnya karena memiliki kendala di kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya SDM.

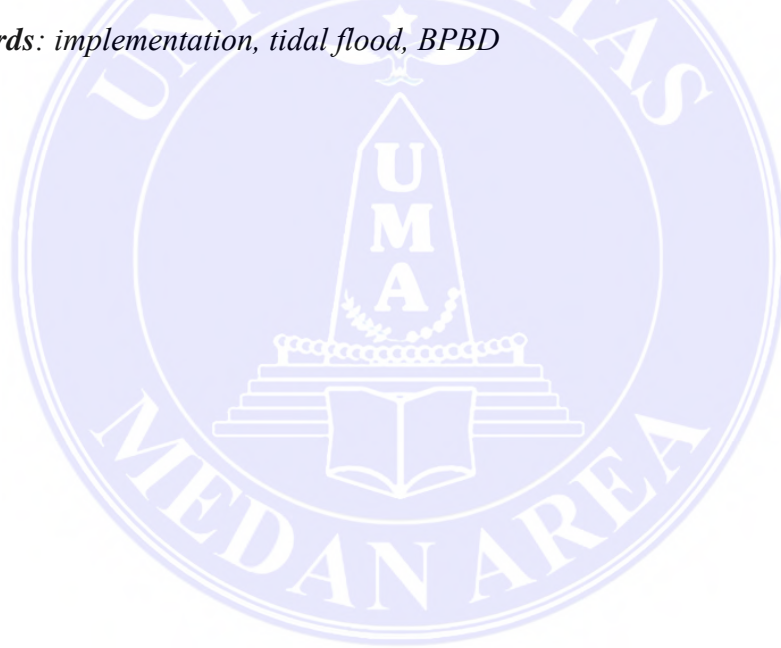
Kata kunci: implementasi, banjir rob, BPBD



Abstract

The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a non-departmental government agency that carries out disaster management tasks in Provinces and Regencies/Cities based on policies stipulated by the National Disaster Management Agency (BNPB). This study aims to find out the Implementation of the Role of BPBD in Medan City According to Presidential Regulation Number 8 of 2008 in Overcoming Rob Floods in Medan Belawan District and to find out what obstacles occur in overcoming tidal floods in Medan Belawan District. This study uses the theory of George C. Edwards III (2006) namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study used descriptive qualitative method. The data were collected through observation, interviews, documentation, and were analyzed qualitatively. This study concludes that successful indicators are disposition indicators and indicators of bureaucratic structure. While the indicators that were not successful were communication indicators and resource indicators, the reason was because they had constraints in the lack of public awareness and lack of human resources.

Keywords: *implementation, tidal flood, BPBD*



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat kasih dan karunia-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul penelitian “Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik (S-1) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu membuat skripsi ini, diantaranya:

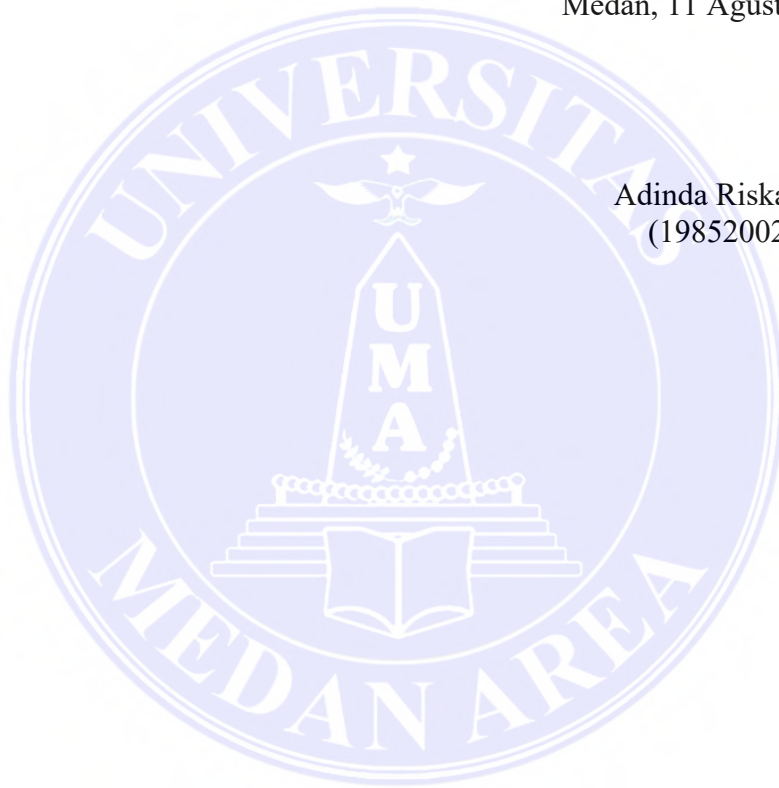
1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis, S.Sos, M. Ipol selaku Ka. Prodi Administrasi Publik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Bahrum Jamil, MAP selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, SAB, MAB selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Fathin Abdullah, SH, M.Hum selaku sekretaris dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Bapak Indra Gunawan, S.Sos selaku Sekretaris BPBD Kota Medan yang sudah bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Yose Verry, S.Sos selaku Sekretaris Camat Kecamatan Medan Belawan yang sudah bersedia menjadi informan dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Ronald Fredy Sihotang, S.IP, M.Si selaku Ketua Bidang Kedaruratan Dan Logistik di BPBD Kota Medan.
11. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak M. Zainal Abidin S. dan Ibu Rahmayanti Agusena yang selalu mendukung, mendoakan dan membimbing penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada adik penulis Rayuan Khanaya yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis.
14. Kepada keluarga penulis yang selalu memberikan semangat dan nasehat.
15. Teman-teman mahasiswa Administrasi Publik stambuk 2019, yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Aulia Ningtyas, Lia Andriani, Suci Wulandari, Putri Astari, Rian Renaldi, Aulia Yusuf Saragih dan yang lainnya yang sudah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan saran atau kritik yang bersifat positif demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat baik pendidikan maupun masyarakat, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Medan, 11 Agustus 2023

Adinda Riska Sari
(198520025)



DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	i
<i>Abstract</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Pengertian Implementasi	11
2.2 Pengertian Peran	18
2.2.1 Konsep Peran	20
2.2.2 Jenis Peran	20
2.3 Pengertian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)	21
2.4 Penanggulangan Bencana	22
2.5 Pengertian Banjir Rob	24
2.6 Penelitian Terdahulu	27
2.7 Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	33

3.3 Waktu Penelitian	33
3.4 Informan Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.2 Visi Dan Misi BPBD Kota Medan.....	38
4.1.3 Tujuan Visi Dan Misi BPBD Kota Medan.....	38
4.1.4 Sasaran Visi Dan Misi BPBD Kota Medan	39
4.1.5 Strategi Dan Kebijakan	40
4.1.6 Struktur Organisasi BPBD Kota Medan	42
4.1.7 Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) BPBD Kota Medan	43
4.2 Pembahasan.....	44
4.2.1 Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan	44
4.2.2 Implemetasi Peran BPBD Dalam Melakukan Penanggulangan Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan Sesuai Dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008	55
4.2.3 Kendala BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
Lampiran 1. Dokumentasi.....	105
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	107

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	33
Bagan 2. Struktur Organisasi BPBD Kota Medan.....	44



DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1. Penelitian Terdahulu	30
Table 2. Waktu Penelitian	35



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Dokumentasi.....	105
Lampiran 2. Pedoman Wawancara.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang sangat rawan terjadi bencana alam karena secara geografis, Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, Benua Indo-Australia, Samudera Hindia, dan Samudera Pasifik. Selain itu, Indonesia terletak di zona *Ring of Fire* dimana terdapat banyak sekali gunung api aktif.

Pengalaman bencana yang terjadi di Indonesia selama ini selalu menimbulkan kerugian, baik materi maupun korban jiwa dalam angka yang besar. Kejadian tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan dan mengaplikasikan kedalam kegiatan keseharian tentang kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Semua ini dikarenakan kebijakan pemerintah dan kepedulian masyarakat tentang manajemen bencana pada tahap pra/sebelum terjadinya bencana sangatlah kurang.

Mengatasi berbagai hal tersebut maka pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dimana BNPB ini akan menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam hal penanganan bencana. BNPB ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Berikut bunyi dari pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008:

- (1) Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut dengan BNPB adalah Lembaga

- (2) Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- (3) BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- (4) BNPB dipimpin oleh seorang Kepala.

Berikut bunyi dari pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008:

BNPB mempunyai tugas :

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, telah mengamatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Mencermati kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis, pada kenyataannya wilayah Kota Medan memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Medan telah didisain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak kerusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih acapkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistematis dan kurang koordinatif.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan memperhatikan kondisi daerah Kota Medan terhadap resiko bencana yang mengancam kehidupan dan penghidupan komunitas masyarakatnya, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 pada tanggal 28 maret 2011 yang tugas utamanya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan. Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*).

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008, Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008 tugas penanggulangan bencana-bencana diatur dalam tiga divisi BPBD yaitu kesiap siagaan, tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Kesiapsiagaan (*Preparedness*): Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
2. Tanggap Darurat (*response*): Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan . Ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian dan pemulihan sarana prasarana. Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap tanggap darurat, diantaranya yaitu:
 - a. Pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
 - b. Penentuan status keadaan darurat bencana
 - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
 - d. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
 - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital
3. Rehabilitasi (*rehabilitation*): Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

4. Rekonstruksi (*reconstruction*): Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang terencana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik.

Bencana merupakan suatu peristiwa di alam yang disebabkan oleh manusia maupun alam yang berpotensi merugikan kehidupan manusia, mengganggu kehidupan normal, serta hilangnya harta dan benda. Salah satu bencana alam yang paling sering melanda Negara Indonesia adalah banjir. Banjir merupakan fenomena alam yang biasa terjadi di suatu kawasan yang banyak dialiri oleh aliran sungai. Secara sederhana banjir dapat di definisikan sebagai hadirnya air di suatu kawasan luas sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut. Namun ada juga banjir yang terjadi bukan karena luapan air sungai tetapi karena luapan air laut, banjir inilah yang disebut dengan banjir rob. Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh naiknya muka laut juga penurunan muka tanah atau biasa disebut sebagai *land subsidence*. Banjir rob merupakan genangan air pada bagian daratan pantai yang terjadi pada saat air laut pasang. Banjir rob menggenangi bagian daratan pantai atau tempat yang lebih rendah dari muka air laut pasang tinggi (*high water level*).

Fenomena banjir rob yang terjadi hampir disepanjang tahun baik terjadi di musim hujan maupun di musim kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan bukanlah faktor utama yang menyebabkan fenomena rob. Air rob merupakan fenomena meluapnya air laut ke daratan. Tarikan bulan dan matahari menjadi jauh lebih besar dibandingkan waktu lainnya ketika bulan, bumi, matahari, benda langit satu garis, inilah saat terjadi pasang besar *Spring Tide*. Kenaikan muka air laut akibat pasang merupakan fenomena alam biasa dan bisa diprediksi. Perubahan pola cuaca ini berpotensi menimbulkan ancaman terhadap berbagai permasalahan seperti *Swell* (gelombang yang ditimbulkan dari jarak jauh), badai tropis yang merupakan fenomena yang sering terjadi di laut, pemanasan *global warming* yang tentunya mengakibatkan mencairnya es di kutub utara sehingga permukaan air laut menjadi naik, fenomena naiknya air laut disebut *Sea Level Rise*, Gabungan dari semua fenomena tersebut menimbulkan pasangunya air laut yang menyebabkan banjir air rob.

Kecamatan Medan Belawan yang terletak pada bagian paling ujung Kota Medan sekaligus berbatasan langsung dengan Selat Malaka di sebelah utaranya, menyebabkan Kecamatan Medan Belawan sangat rawan di landa bencana banjir Rob. Sebelumnya banjir Rob hanya terjadi dua kali dalam setahun, namun beberapa tahun kebelakangan ini banjir Rob menjadi sangat sering hingga dalam sebulan bisa 2 kali melanda masyarakat Kecamatan Medan Belawan.

Banjir rob terjadi akibat adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pasang surut air laut. Selain itu, banjir rob juga disebabkan oleh faktor-faktor tenaga eksternal seperti dorongan air, angin, atau *swell* (gelombang yang bergerak dengan jarak sangat jauh meninggalkan daerah pembangkitnya); badai di laut; serta

pencairan es kutub yang dipicu oleh pemanasan global Penurunan muka tanah yang terus menerus terjadi akan menyebabkan naiknya air laut ke daratan saat terjadi pasang. Naiknya air laut ke daratan diartikan sebagai genangan banjir rob. Genangan banjir rob ini juga dipengaruhi oleh permukaan air laut yang lebih tinggi dari permukaan tanah.

Genangan rob dapat mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, kekurangan air bersih, mengganggu transportasi umum, bahkan dapat menenggelamkan rumah dan kawasan terdampak. Apabila genangan rob yang disebabkan oleh *land subsidence* tidak ditangani oleh pemerintah dan masyarakat setempat, maka luasan dari wilayah terdampak akan semakin bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya data dan informasi terkait luasan dan kawasan terdampak genangan banjir rob sebagai dasar untuk menanggulangi permasalahan banjir rob.

Dampak yang diakibatkan oleh bencana banjir rob ini adalah penyebaran penyakit, seperti gatal-gatal pada kulit akibat alergi, diare, ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Atas), demam berdarah dan penyakit lainnya. Penyakit tersebut timbul dikarenakan keadaan rumah yang kotor akibat dari genangan banjir air rob tersebut. Dampak akibat banjir rob meliputi berbagai aspek kehidupan seperti mengubah fisik lingkungan, penurunan kualitas lingkungan, dan kerugian ekonomi.

Dampak negatif yang diakibatkan oleh banjir rob tersebut, membuat Pemerintah Daerah Kecamatan Medan Belawan melakukan upaya-upaya penanggulangan terjadinya bencana banjir rob. Diantaranya adalah menyiapkan anggaran untuk pembangunan tanggul sejauh 7 km. Dengan tanggul ini diharapkan

dapat mencegah banjir rob di Kecamatan Medan Belawan. Selain itu upaya lain yang sedang di rencanakan oleh Walikota Medan adalah dengan cara pembangunan rumah apung. Pembangunan rumah apung dipilih karena pondasi yang dimiliki rumah apung lebih tinggi dari pada pondasi rumah biasanya dan pembangunan rumah apung sendiri teletak diatas permukaan air laut yang otomatis dapat mengurangi pembangunan di lahan darat. Selain itu dengan ketinggian rumah apung juga tidak akan menyebabkan masuknya air laut kedalam rumah warga sehingga tidak merusak pondasi rumah warga sekitar.

Merujuk pada data PUSDALOPS-PB (Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) penanggulangan bencana banjir rob di Kecamatan Medan Belawan, BPBD selaku lembaga penanggung jawab atas terjadinya bencana alam melakukan berbagai upaya dalam penanganan bencana banjir rob di Kecamatan Medan Belawan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemantauan dan monitoring daerah banjir rob
- b. Berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan setempat
- c. Mempersiapkan peralatan evakuasi tanggap darurat
- d. Memonitoring perkembangan dan cuaca BMKG
- e. Menghimbau kepada warga agar tetap siaga apabila terjadi kenaikan debit air laut secara tiba-tiba

BPBD pada dasarnya sudah diberikan kewenangan dalam penanggulangan bencana, namun kenyataannya di lapangan terdapat permasalahan dan kendala, khususnya BPBD Kota Medan. Kendala yang dialami seperti kurangnya

kompetensi sumber daya manusia sebagai petugas dalam pelaksanaan kegiatan lembaga serta kurangnya prasarana dan sarana penanggulangan bencana.

Dari permasalahan penanggulangan bencana banjir diatas penulis ingin membahas mengenai **“Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan?
2. Apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam mengatasi banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam mengatasi banjir rob di Kecamatan Medan Belawan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi untuk menambah kumpulan pustaka mengenai Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Terkait. Menambah wawasan bagi pelaksana Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan.
- b. Bagi Mahasiswa. Diharapkan dapat berguna sebagai tambahan untuk kepustakaan dan sebagai sumber informasi dalam membagikan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan.
- c. Bagi Penulis. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Mengatasi Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Implementasi

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindaklanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Secara etimologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik. Kebijakan

implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya dalam (Mustari, 2013).

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Pendekatan yang digunakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. implementasi dapat dimulai melalui kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi (*communicattions*), sumber daya (*resources*), sikap (*dispositions* atau *attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*).

Ke-empat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antar satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang kuat. Tujuan kita adalah meningkatkan pengetahuan tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan dengan cara diturunkan (*breakdown*) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis yang dimana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor yang mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui

pengaruhnya terhadap implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi menurut George C. Edwards III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor ini dalam Implementasi akan berjalan efektif dan efisien apabila ukuran dan tujuan kebijakan yang dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Keseragaman serta konsistensi terhadap ukuran dasar dan tujuan perlu adanya komunikasi yang baik sehingga implementor dapat memahami secara tepat terhadap ukuran maupun tujuan kebijakan tersebut. Komunikasi dalam suatu organisasi adalah suatu proses yang amat kompleks. Seseorang biasa menggunakannya atau menyebarkannya hanya untuk kepentingan tertentu. Disamping itu adanya informasi yang berbeda juga akan menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat terlaksana dengan efektif, tentunya ada yang bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan dan harus memahami apakah mereka dapat melaksanakannya. Bahwasanya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pihak dan personel agar dapat memahami secara jelas dan akurat terkait dengan maksud dan tujuan kebijakan. Jika ada aktor pembuat kebijakan telah melihat adanya ketidak jelasan dalam spesifikasi kebijakan maka tentunya mereka tidak memahami tentang apa yang sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan akan merasa bingung dengan apa yang mereka lakukan

sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang efektif dan optimal. Kurangnya komunikasi kepada para implementor secara serius akan berdampak pada implementasi kebijakan.

2. Sumber daya

Komponen sumber daya ini terdiri jumlah staf, keahlian dari para pelaksana atau staf tersebut, informasi yang jelas dan relevan agar cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Bukan suatu masalah jika adanya sikap konsisten dalam implementasi program dan akuratnya komunikasi yang dikirim, apabila personel yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan program mengalami kekurangan sumber daya dalam melakukan tugasnya, maka sumber daya manusia yang tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kemampuan akan berdampak pada tidak terlaksananya program secara efektif dikarenakan mereka tidak mampu melakukan pengawasan dengan baik. Dengan demikian, Jika jumlah personil pelaksana kebijakan terbatas maka upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan para pelaksana untuk menjalankan program kebijakan tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan manajemen sumber daya manusia yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Kurangnya kemampuan pelaksana program ini

disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan *skill* yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik tentang kelistrikan.

Informasi merupakan bagian sumber daya yang sangat penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi yang terkait bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksanaan harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang-undang. bukti dilapangan menunjukkan bahwa tingkat pusat kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kurangnya informasi dan pemahaman tentang bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti para oknum pelaksana tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kemudian pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan masalah baru. Implementasi kebijakan membutuhkan ketaatan organisasi dan individu pelaksana terhadap peraturan pemerintah yang yang berlaku. Selain itu, Sumberdaya yang dibutuhkan adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk mengatur/membelanjakan keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, serta pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan kantor, serta dana yang mencukupi tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

3. Sikap (Disposisi)

Faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya implementasi kebijakan ialah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan poin atau bagian isi dari kebijakan tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami kesulitan dan bahkan akan menimbulkan banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan; yaitu adanya kesadaran implementor, dan petunjuk pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan dan penolakan, serta intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud sasaran program namun seringkali tujuannya tidak tercapai secara tepat dikarenakan mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara diam mereka alihkan dan menghindari implementasi program tersebut. Selain itu dukungan para pejabat pelaksana juga sangat dibutuhkan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat berdampak pada pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif. wujud dari dukungan pimpinan ini adalah dengan menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, menempatkan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, serta memperhatikan keseimbangan daerah, agama, jenis kelamin, suku, dan karakter demografi yang lain. selain itu, indikator ini menyediakan dana yang cukup guna memberikan insentif

bagi para pelaksanaan program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak dapat dilepaskan dari badan pelaksana suatu kebijakan, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang badan-badan eksekutif mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka memiliki dalam menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan
- b. Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sud unit dan proses-proses dalam badan pelaksana
- c. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif)
- d. Tingkat komunikasi “terbuka” yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi
- e. Vitalitas suatu organisasi
- f. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumber daya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal

ketika struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak pihak, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implemetasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan berdampak pada individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

2.2 Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang sedang di jalankan atau suatu aktivitas memeragakan. Peran di artikan juga sebagai sebuah aktivitas yang di mainkan atau di perankan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Sedangkan peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah pemain sandiwara atau film, tukang lawak, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di peserta didik.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “*tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan*”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Peran menurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Sarlito, 2015).

Levinson dalam (Soekanto 2009) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sekian banyaknya teori tentang peran, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk

menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

2.2.1 Konsep Peran

Adapun konsep peran menurut Sukanto (2012) adalah sebagai berikut:

- 1) Persepsi Peran: adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.
- 2) Ekspektasi Peran: merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.
- 3) Konflik Peran: saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain.

2.2.2 Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis.

Menurut Soekanto (2012), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.
- 2) Peran Partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

- 3) Peran Pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

2.3 Pengertian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

Upaya dalam menanggulangi bencana di daerah perlu dimulai dengan adanya kebijakan daerah yang bertujuan untuk menanggulangi bencana yang sesuai dengan peraturan yang ada. Strategi yang di pilih daerah dalam menanggulangi bencana harus di sesuaikan pula dengan kondisi daerahnya. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus di pastikan agar bisa berjalan dengan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah, maka perlu dimulai dengan cara mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana alam di daerah teseut. Salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (SATKORLAK) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAKPB) di tingkat Kabupaten / Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun

2005. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sesuai dengan pendapat Soekanto (2009) mengenai peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya peran BPBD sebagai lembaga daerah yang bertugas dalam penanggulangan bencana sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana dapat di jalankan dengan baik dan dapat memenuhi perannya di dalam Masyarakat sekaligus menjadi lembaga yang sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugasnya yaitu sebagai lembaga penanggulangan bencana di daerah, khususnya di Kecamatan Medan Belawan.

2.4 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan adalah semua tindakan yang dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi jika terjadi suatu hal yang merugikan. Sedangkan bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat dan bisa sampai memakan korban jiwa, bencana ini terjadi karena factor alam ataupun non alam (ulah manusia) yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi penanggulangan bencana adalah suatu tindakan ketika sedang menghadapi atau

untuk mengatasi ketika terjadinya suatu bencana alam yang dapat merugikan masyarakat sekitar.

Mitigasi adalah langkah yang memiliki tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang juga dilakukan sebelum bencana terjadi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mitigasi bencana berfokus pada pengurangan risiko bencana, sedangkan penanggulangan bencana berfokus pada seluruh kebijakan kegiatan saat terjadinya bencana.

Dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Tahap pra-bencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam ancaman potensi bencana
2. Tahap tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana.
3. Tahap pasca bencana yang dalam saat setelah terjadi bencana.

Tujuan dari 3 tahapan tersebut adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari resiko bencana. Undang-undang No. 8 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2011 tentang penyelenggaraan bencana adalah payung nasional untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah bersama DPR pada tahun 2007 telah menetapkan Undang Undang Nomor 24 tahun 2007

tentang Penanggulangan Bencana (UU PB) sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tahapan pencegahan dan mitigasi bencana ini diharapkan dapat mengatasi dan menanggulangi dari resiko bencana. Upaya yang dapat dilakukan seperti memperbaiki dan memodifikasi lingkungan fisik ataupun kesadaran serta meningkatkan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural. Secara struktural yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) dari bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerentanan (*vulnerability*) dari bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana.

2.5 Pengertian Banjir Rob

Banjir menurut Sugiyanto dan Kodoatie (2002) terjadi karena dua hal yaitu banjir yang terjadi pada daerah rawan banjir dan banjir yang terjadi karena limpasan air sungai maupun air laut. Berikut ini beberapa sebab alami dan buatan terjadinya banjir diantaranya curah hujan, erosi dan sedimentasi, pengaruh pasang surut air laut, daya tampung drainase, persampahan dan kawasan kumuh.

Rob adalah suatu fenomena yang biasa terjadi di daerah yang teletak di tepi pantai, salah satu contohnya adalah Kecamatan Medan Belawan. Banjir rob disebabkan karena naiknya muka laut juga penurunan muka tanah atau biasa disebut

sebagai *land subsidence*. Banjir rob adalah genangan air pada daratan pantai yang terjadi pada saat air laut pasang. Banjir rob menggenangi bagian daratan pantai atau tempat yang lebih rendah dari muka air laut pasang tinggi (*high water level*).

Fenomena banjir rob terjadi hamper di sepanjang tahun, baik ketika musim hujan ataupun musim kemarau. Karenanya curah hujan tidak menjadi salah satu factor utama penyebab banjir rob. Banjir rob terjadi karena pengaruh dari tinggi atau rendahnya pasang surut air laut yang terjadi karena gaya gravitasi bulan. Walaupun massa matahari jauh lebih besar dibandingkan massa bulan, namun karena jarak bulan yang lebih dekat ke bumi maka gravitasi bulan memiliki pengaruh yang lebih besar. Banjir rob terjadi akibat dari kenaikan muka air laut yang disebabkan pasang surut dan faktor-faktor lain seperti dorongan air, angin atau *swell* (gelombang yang diakibatkan dari jarak jauh) dan badai yang sering terjadi di laut. Selain itu, banjir rob juga terjadi karena adanya fenomena iklim global yang ditandai dengan peningkatan temperatur rata-rata bumi dari tahun ke tahun. Lapisan ozon yang merupakan pelindung bumi dari pengaruh sinar matahari sehingga apabila lapisan ini menipis maka akan terjadi pemanasan global, yang menyebabkan lapisan es di kutub utara dan antartika mencair. Akibatnya, permukaan laut air global naik. Berdasarkan laporan rata-rata suhu permukaan global meningkat 0,3-0,6 °C, sejak akhir abad 19 sampai tahun 2100 suhu bumi diperkirakan akan naik sekitar 1,4-5,8°C.

Lama genangan banjir rob juga sesuai dengan lamanya waktu pasang surut air laut. Biasanya banjir rob terjadi dalam waktu beberapa jam saja. Sebaran genangan banjir rob biasanya terjadi di wilayah pesisir pantai, rawa dan dataran rendah di sekitaran pantai. Luas sebaran genangan banjir rob ini dapat ditentukan

dengan ketinggian air laut saat pasang, namun hal ini akan semakin berbahaya jika terjadi penurunan muka tanah di daerah genangan tersebut. Untuk mengurangi luas genangan banjir rob yang terjadi maka diperlukan informasi terkait penggunaan lahan guna melakukan perubahan dan penanganan penggunaan lahan agar dapat disesuaikan dengan bencana yang terjadi. Semakin luasnya sebaran banjir rob dapat mempengaruhi harga tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Hal itu menyebabkan pentingnya analisis terkait sebaran banjir rob guna mengetahui upaya penanganannya (Kurniawan, 2013).

Dampak yang terjadi akibat dari banjir rob adalah kerusakan infrastruktur dan fasilitas umum yang merugikan masyarakat sebagai pengguna dan juga merugikan bagi para pemerintah yang sudah membangun dan menyediakan fasilitas umum tersebut. Yang harus diperhatikan ketika terjadi banjir rob adalah jalan dan drainase. Ketika jalanan terendam air pasang akan menyebabkan konstruksi jalan seiring berjalannya waktu akan menjadi cepat rusak. Sama halnya seperti drainase, terjadi sedimentasi dari penumpukan sampah dan lumpur yang tidak dapat di elakkan, maka harus dilakukan perbaikan dan pengurusan terhadap drainase tersebut.

Dampak selanjutnya adalah kelumpuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tergenang banjir rob. Hal ini disebabkan karena tidak berfungsinya sarana dan prasarana yang ada, seperti halte bis, terhambatnya bongkar muat di pelabuhan sampai terjadi kemacetan. Masalah kesehatan juga menjadi dampak dari terjadinya banjir rob. Wilayah tergenang banjir rob tak jarang berubah menjadi wilayah kumuh dan sumber penyakit seperti diare, penyakit kulit, iritasi dan kutu air akibat dari terpapar secara langsung dengan genangan banjir rob. Keadaan ini bisa diatasi

dengan cara yaitu pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti polder dan DLP (DAM Lepas Pantai). Karenanya dibutuhkan partisipasi masyarakat yang terdampak untuk mengatasi banjir dengan melibatkan organisasi masyarakat dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap banjir rob.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Manfaatnya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai dasar perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu tidak terlepas dari variabel penelitian ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini:

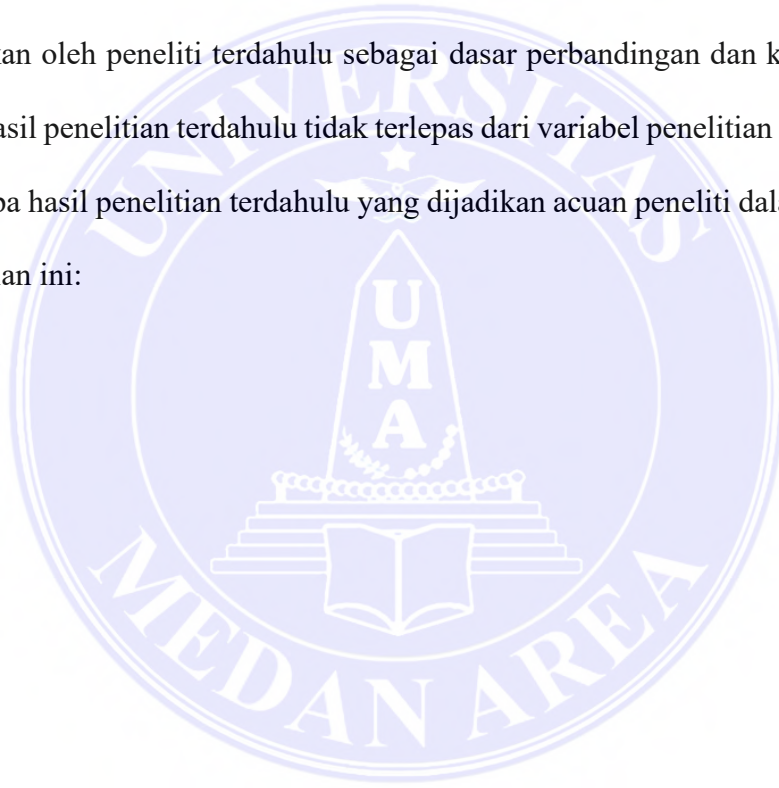


Table 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
1	Analisis Risiko Sosial Bencana Banjir Rob Di Pesisir Kabupaten Demak	Rizky Dwi Chandra Thanjaya	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif disertai survei lapangan dengan teknik Simple Random Sampling.	Hasil analisis menunjukkan persebaran spasial genangan banjir rob hasil pemodelan skenario 200 cm memiliki luas total 127,32 km ² yang menggenangi sebanyak 40 desa dari 4 kecamatan dengan 29 desa memiliki tingkat bahaya tinggi, 6 desa memiliki bahaya sedang, dan 5 desa memiliki bahaya rendah. Sebanyak 20 desa memiliki kerentanan sosial rendah, 14 desa dengan kerentanan sosial sedang, dan 6 desa dengan kerentanan sosial tinggi. Kemudian hasil klasifikasi tingkat risiko sosial menunjukkan 5 desa memiliki risiko sosial rendah, 20 desa memiliki risiko sosial sedang, dan 15 desa memiliki risiko sosial tinggi.
2	Pengurangan Resiko Bencana Banjir ROB Di Kota Dumai	Dicky Pangestu Chandra	Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis metode skoring dan overlay arcgis untuk menganalisis data spasial banjir rob.	Hasil dari penelitian ini berupa (i) Tingkat bahaya banjir rob di Kota Dumai ada dua tingkatan yaitu rendah dan sedang (ii) tingkat kerentanan banjir rob di Kota Dumai ada tiga tingkatan yaitu rendah sedang dan tinggi (iii) tingkat resiko bencana banjir rob di Kota Dumai yaitu tinggi (iv) bentuk tindakan adaptasi masyarakat Kota Dumai yaitu membuat tempat penyimpanan barang-barang sementara dengan presentase 63,35%, mengungsi ke rumah sanak saudara dengan presentase 67,08%, alokasi dana pemulihan bencana dari tabungan dengan persentase pernyataan 58,73%, pihak yang membantu adalah keluarga dengan persentase jawaban 68,10%. (v) konsep pengurangan risiko banjir rob di Kota Dumai berupa pengurangan resiko secara non-struktural dan struktural.

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Metodologi	Hasil Penelitian
3	Pemetaan Banjir Rob Medan Utara Menggunakan Artificial Neural Network dan Gis untuk Langkah Mitigasi	Monang Panjaitan, Ahmad Perwira Mulia dan Zaid Perdana Nasution	Analisis kuantitatif terhadap data dilakukan menggunakan <i>Geographic Information System (GIS)</i> dan <i>Artificial Neural Network</i> .	Hasil penelitian dengan rumus MAPE menunjukkan akurasi data <i>train</i> percobaan 1 sebesar 64,54137% dan data tes percobaan 1 sebesar 71,0257%. Sementara data <i>train</i> percobaan 2 sebesar 71,0257% dan data tes percobaan 2 sebesar 45,67167%. Akurasi data <i>train</i> percobaan 2 menggunakan rumus nilai eror < 1,5 sebesar 92% dan data tes percobaan 2 sebesar 68,61%.
4	Pemetaan Banjir Rob Terhadap Pasang Tertinggi di Wilayah Pesisir Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara.	Hendra Frederick, Agus Anugroho Dwi dan Hariadi	Menggunakan metode Admiralty 15 hari	Hasil dari penelitian ini adalah luas genangan rob pada bulan September Tahun 2015 yang terjadi di Kecamatan Medan Belawan dengan nilai <i>Highest High Water Level</i> sebesar 232,71 cm adalah 1066,956 ha meliputi Kelurahan Sicanang, Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan Bahagia, Kelurahan Belawan Bahari, Kelurahan Belawan II dan Kelurahan Bagan Deli.
5	Mitigasi Bencana Banjir Rob di Jakarta Utara	Rangga Chandra K dan Rima Dewi Supriharjo	Menggunakan analisa deskriptif dan menggunakan analisa <i>delphi</i>	Dari penelitian ini didapatkan luas wilayah yang berada pada tingkat resiko banjir robsangat tinggi sampai dengan kurang berisiko dan kecamatan yang paling berisiko adalah Kecamatan Cilincing, Kecamatan Koja dan Kecamatan Tanjung Priok.

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

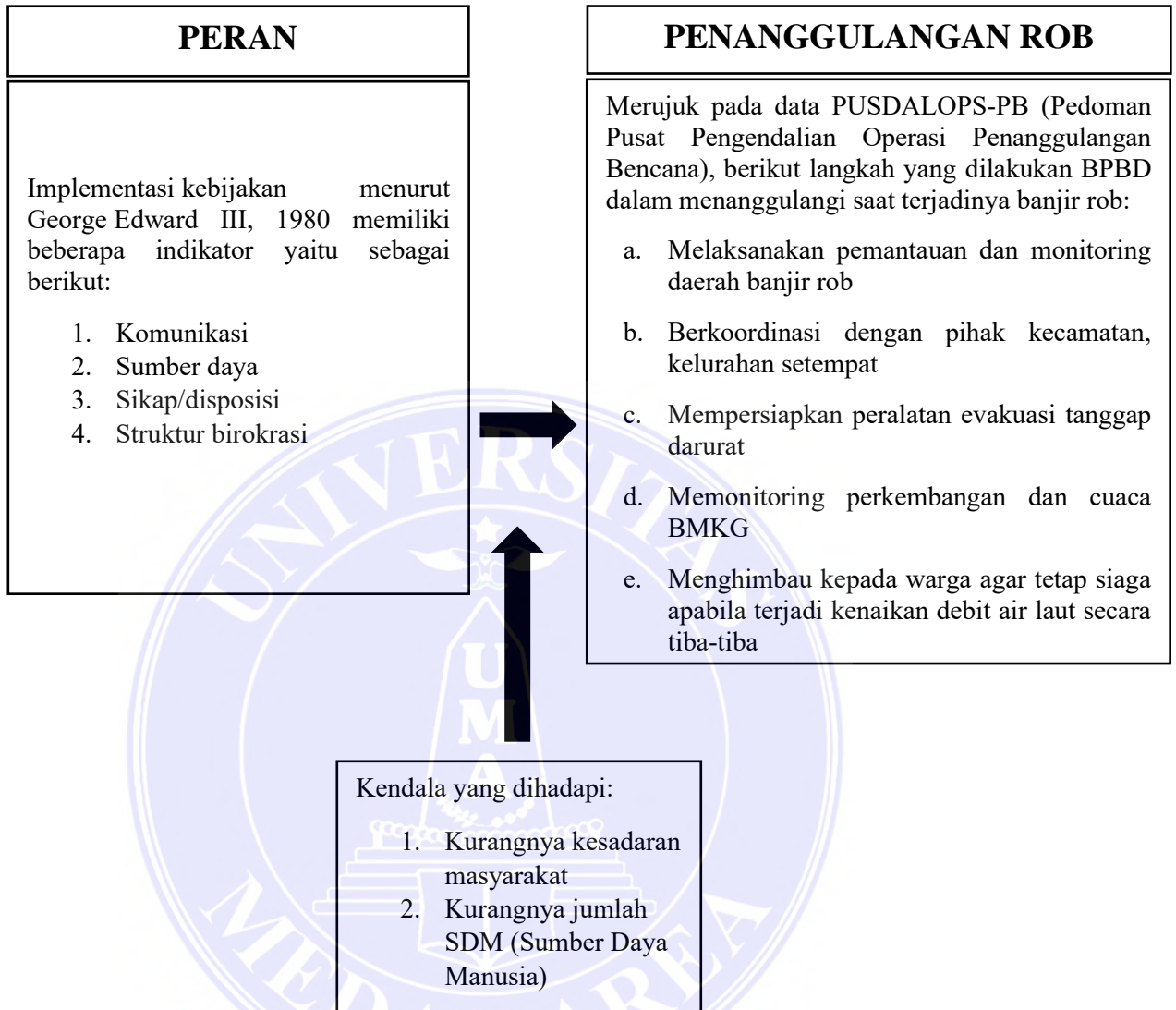
Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Kegunaannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai dasar perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu tidak terlepas dari variabel penelitian ini.

2.7 Kerangka Pemikiran

Juliansyah (2011), Kerangka pemikiran adalah kerangka pikir mengenai hubungan antar variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini merupakan suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dengan menggeneralisasikan suatu pengertian. Oleh karena itu, konsep tidak dapat diamati dan diukur secara langsung. Agar konsep ini dapat diamati dan diukur, maka konsep tersebut harus dijabarkan terlebih dahulu menjadi suatu variable-variabel yang tersusun. Jadi bisa dikatakan kerangka pemikiran merupakan suatu pemikiran baru tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.

BPBD memiliki peran sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir rob yang telah di bentuk sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 dan sudah memiliki tupoksi sesuai dengan peraturan. Namun ternyata di lapangan tetap memiliki beberapa kendala sehingga BPBD yang memiliki peran sebagai lembaga penanggung jawab belum bisa mengimplementasikan tugas nya yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tersebut.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada sebuah penelitian, peneliti diharuskan untuk menentukan jenis penelitian yang ingin dipilih. Istilah jenis penelitian merupakan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan cara kerja dalam melakukan sebuah penelitian. Secara garis besar metode penelitian bersifat alamiah yang tujuannya untuk mendapatkan suatu data.

Menurut Sugiyono (2015) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (penggabungan), analisa data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Menurut Sugiyono (2012) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran dan uraian terkait Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan sebuah informasi yang dibutuhkan sebelumnya harus menentukan lokasi tempat peneliti melakukan sebuah penelitian. Maka dari itu peneliti telah menentukan lokasi penelitian Di Kecamatan Medan Belawan.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Medan Belawan dimulai sejak judul skripsi ini disetujui. Adapun tahapan dari perincian kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

Tabel 2. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Sep 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Jul 2023	Sept 2023
1.	Pengajuan Judul								
2.	Penyusunan Proposal								
3.	Seminar Proposal								
4.	Perbaikan Proposal								
5.	Penelitian								
6.	Penyusunan Skripsi								
7.	Seminar Hasil								
8.	Perbaikan Skripsi								
9.	Sidang Meja Hijau								

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023

3.4 Informan Penelitian

Ada tiga jenis informan dalam penelitian kualitatif:

- a. Informan kunci adalah orang-orang yang mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang masalah yang peneliti coba pecahkan. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris BPBD Kota Medan yaitu Bapak Indra Gunawan dan Sekretaris Camat Kecamatan Medan Belawan yaitu Bapak Yose Ferry.
- b. Informan utama yaitu orang-orang yang secara teknis dan mendalam mengetahui masalah penelitian yang akan diteliti disebut sebagai informan utama. Informan utama penelitian ini adalah Kepala Bidang Tanggap Darurat BPBD Kota Medan yaitu Bapak Ronald Sihotang.
- c. Informan tambahan, dalam penelitian kualitatif, informan tambahan adalah orang-orang yang dapat menambah analisis dan pembahasan dengan memberikan informasi tambahan. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Medan Belawan yang terdampak bencana banjir Rob sebanyak 2 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data berupa teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data skunder. Teknik pengumpulan data primer adalah teknik pengumpulan data yang langsung

diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara:

1. Wawancara mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut.
 - a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
 - b. *Tape recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan.
2. Observasi tidak terstruktur, yaitu observasi dilakukan tanpa menggunakan *guide* (pedoman) observasi. Dan teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan untuk mendukung kelengkapan dari data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan studi kepustakaan.
3. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, jurnal, majalah dan laporan penelitian serta yang lainnya.

4. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (Sugiono, 2015) mengungkapkan bahwa proses analisis data terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Reduksi Data, adalah bentuk analisa untuk memilih dan memilah data yang telah dikumpulkan. Juga menggolongkan, mengarahkan, hal-hal tidak penting dibuang dan disusun mengorganisasikan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data, merupakan bagian dari analisis sehingga data yang diperoleh dapat menampilkan kegiatan reduksi untuk memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, menarik kesimpulan merupakan tahap akhir yang digunakan untuk mendapatkan hasil keabsahan data dalam penelitian, sedangkan verifikasi adalah suatu tujuan ulang atau pembuktian terhadap kesimpulan yang telah diambil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang berhasil adalah indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Sedangkan indikator yang tidak berhasil adalah indikator komunikasi dan indikator sumber daya. Penyebab tidak berhasilnya indikator tersebut karena memiliki kendala yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat
2. Kurangnya jumlah SDM (Sumber Daya Manusia)

5.2 Saran

Adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPBD dan pihak Kecamatan haruslah terus dilakukan, tapi dengan ketegasan dan sanksi bagi masyarakat yang melanggar agar masyarakat merasa takut dan menjadi lebih tertib.
2. BPBD sendiri haruslah menambah jumlah tim nya yang turun langsung dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, agar semakin banyak SDM-nya maka semakin cepat pula proses evakuasi dan penanggulangan bencana bisa dilakukan. Dengan cara membuka lowongan bagi SDM yang ahli dan kompetenn dibidangnya. Hal ini juga akan membantu membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat disekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edwards III, G. C. (2006). *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc.
- Kodoatie, R.J. dan Sugiyanto, 2002. *Banjir, Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kurniawan, dkk. (2013). *Studi Perubahan Nilai Tanah dan Penggunaan Lahan Pada Daerah Rawan Genangan Banjir Rob di Kecamatan Semarang Utara*. *Jurnal Geodesi Undip*, 2(4), 41–56.
- Mustari, Nuryanti, 2013. *Implementasi Kebijakan Publik*, Makassar Membumi Publishing.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Sarlito Wirawan. 2015. *Teori-teori psikologi sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2009). *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru*: Rajawali Pers. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Agus Nur Shidik, D. U. (2019). *Analisis Penyebab Faktor Banjir Rob Dan Strategi Penanggulangannya Dengan Pembangunan Breakwater Di Wilayah Semarang Utara, Jawa Tengah, Indonesia*. D026UNO, 559-575.
- Dian Rasmana Putra dan Dr. rer.nat. Muh. Aris Marfai, M. (2012). *Identifikasi Dampak Banjir Genangan (Rob) Terhadap Lingkungan Permukiman Di Kecamatan Pademangan Jakarta Utara*.
- Hendra Frederick, A. A. (2016). *Pemetaan Banjir Rob Terhadap Pasang Tertinggi Di Wilayah Pesisir Kecamatan Medan Belawan, Sumatra Utara*. *jurnal oseanografi*, 334-339.
- Larama, R. (2020). *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Provinsi Dalam Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi Di Lombok*. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram 1-79.

Matondang, I. R. (2016). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan Dalam Penanggulangan Bencana Alam*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik, 176-185.

Nawi, Rusdin, 2018. Reinventing Government dalam Model Analisis Kebijakan Pelayanan Birokrasi di Indonesia. Jurnal Universitas SatriaMakassar.

Rochani, A. W. (2021). *Analisis Penyebab Banjir Rob Di Kawasan Pesisir Studi Kasus: Jakarta Utara, Semarang Timur, Kabupaten Brebes, Pekalongan*. Jurnal Kajian Ruang, 16-28.

Supriharjo, R. C. (2013). *Mitigasi Bencana Banjir Rob Di Jakarta Utara*. Jurnal Teknik Pomits, 2301-9271.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang *Penanggulangan Bencana*
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang *Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)*
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang *Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana*
4. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018*

Artikel:

BPBD Karanganyar. (2021). *Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar*. diakses pada tanggal 1 november 2022, pukul 19.03 WIB dari <https://bpbd.karanganyarkab.go.id/?p=128>

BPBD Nusa Tenggara Barat. (2021). *Penanganan Bencana*. diakses pada tanggal 1 november 2022, pukul 19.28 WIB dari <https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/penanganan-bencana>

Kilat.com. (2023). *Medan Belawan Kembali Dilanda Banjir ROB warga Was-was*. diakses pada tanggal 1 november 2022, pukul 20.39 WIB dari <https://www.kilat.com/news/nasional/73013/medan-belawan-kembali-dilandabanjir-rob-warga-was-was/>

Pinhome. (2022). *Medan Belawan*. diakses pada tanggal 1 november 2022, pukul 21.01 WIB dari <https://www.pinhome.id/info-area/medan/medan-belawan/>

Rimbakita.com. (2019). *Apa Itu Banjir Rob? – Ciri, Penyebab, Dampak & Cara Mengatasinya*. diakses pada tanggal 25 mei 2023, pukul 1.35 WIB dari <https://rimbakita.com/banjir-rob/>

Harian haluan.com. (2022). *Fenomena Alam: Cara Menanggulangi Banjir Rob*. diakses pada tanggal 25 mei 2023, pukul 2.00 WIB dari <https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-103520977/fenomena-alam-cara-menanggulangi-banjir-rob>

Lampiran 1. Dokumentasi



Gambar 1. Dokumentasi dengan Bapak Indra Gunawan selaku Sekretaris BPBD Kota Medan



Gambar 4. Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan Water Rescue



Gambar 2. Dokumentasi dengan Bapak Ronald Sihotang sebagai Kepala Bidang Tanggap Darurat BPBD Kota Medan



Gambar 5. Dokumentasi bersama Ibu Salmiah Br Siagian



Gambar 3. Dokumentasi bersama TRC (Tim Reaksi Cepat)



Gambar 6. Dokumentasi bersama Ibu Sarawiyah



Gambar 7. Dokumentasi dengan Bapak Yose Ferry selaku Sekretaris Camat Kecamatan Medan Belawan dan Bapak KASITRANTIB



Gambar 8. Dokumentasi latihan kemampuan water rescue TRC BPBD Kota Medan



Gambar 9. Dokumentasi Posko Banjir Rob



Gambar 10. Dokumentasi Posko Banjir Rob

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Subjek Penelitian:

1. Sekretaris BPBD Kota Medan dan Kepala Bidang Tanggap Darurat Kota Medan.
2. Sekretaris Camat Kota Medan.

Disposisi

1. Apakah dengan adanya lembaga BPBD pengimplementasian Peraturan Presiden No.8 Tahun 2008 sebagai dasar pembentukan BPBD sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah lembaga BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah sudah bisa mengatasi bencana banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?
3. Langkah apa yang diambil pihak BPBD dan Kecamatan Medan Belawan dalam menanggulangi bencana banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?
4. Apakah ada pengawasan dan pengendalian terhadap daerah yang rawan terkena banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?

Komunikasi

1. Apakah pihak BPBD dan Kecamatan melakukan pencegahan bencana terhadap masyarakat mengenai penanganan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh BPBD dan Kecamatan saat melakukan pencegahan bencana?

Sumber Daya

1. Berapa jumlah SDM yang turun langsung dalam penanggulangan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan baik dari pihak BPBD maupun Kecamatan?
2. Apakah SDM tersebut sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan sebelumnya untuk meningkatkan kualitas SDM guna penanggulangan banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?
3. Bagaimana sarana dan prasarana yang dimiliki pihak BPBD dan Kecamatan dalam penanggulangan bencana banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?
4. Berasal darimana kah sumber dana yang dikeluarkan untuk penanggulangan bencana banjir rob di Kecamatan Medan Belawan?

Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi BPBD Kota Medan?
2. Apakah BPBD Kota Medan memiliki SOP? Dan bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab perbidang?

Subjek Penelitian: Masyarakat yang terkena dampak banjir rob di Kecamatan Medan Belawan

Komunikasi

1. Apakah ada pencegahan bencana yang di selenggarakan pihak BPBD dan Kecamatan untuk masalah penanggulangan Bencana banjir rob?
2. Menurut Bapak/Ibu kendala apa saja yang dialami BPBD dan Kecamatan saat mengadakan pencegahan bencana?

Sumber Daya

1. Menurut Bapak/Ibu berapa jumlah SDM yang turun langsung ke lapangan dalam proses penanggulangan bencana banjir rob baik dari pihak BPBD maupun Kecamatan?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD dan Kecamatan Medan Belawan, apakah sudah memadai?

Disposisi

1. Apakah menurut Bapak/Ibu langkah yang diambil oleh BPBD dan Kecamatan Medan Belawan dalam penanggulangan bencana banjir rob sudah berjalan dengan baik?
2. Apakah ada menurut Bapak/Ibu pengawasan dan monitoring pada daerah yang rawan terkena banjir rob?

Struktur Birokrasi

1. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar BPBD sebelumnya? Bagaimana menurut anda mengenai kinerja BPBD?
2. Apakah menurut Bapak/Ibu BPBD bisa mengatasi bencana banjir rob di Kecamatan Medan belawan?